

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Albrecht, Chad O., Albrecht, Conan C., dan Albrecht, W. Steve, 2006, *Fraud Examination*, Cengage Learning, Boston.
- Ali, Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, dan Asikin, H. Zainal, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Amrullah, M. Arief, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Anwar, Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Asdi Mahasatya.
- Asshidiqie, Jimly, 2005, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- _____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly, 2016, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Crofts, Penny Crofts, Stephen Gray, Bronwyn Glynis Naylor, Tyrone Kirchengast, dan Steven Tudor, Wayne Thomas, 2016, *Waller and*

- Williams Criminal Law Text and Cases*, Lexisnexis Butterworths, New York.
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, dan Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Farid, Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Federal Election Commission, 2013, *Campaign Guide for Political Party Committees*, Federal Election Commission, Washington D.C.
- Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Klitgaard, Robert, 1998, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Krisnawati, Dani, dan Hiariej, Eddy O.S., 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Kena Pundi Aksara, Jakarta.
- Kusumah, M.W., 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lopa, Baharuddin, 1997, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Kipas Putih Aksara, Jakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Hiariej, Eddy O.S., 2018, *Menjerat Korupsi Partai Politik*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- _____, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muladi, dan Priyatno, Dwidja, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Poerwardarminta, W.J.S., 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Safa'at, 2011, Muchamad Ali, *Pembubaran Partai Politik, Pengaturan, dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Salam, Moch. Faisal, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Penerbit Pustaka, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sarosa, Samiaji, 2012, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Indeks, Jakarta.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., Sutorius, E. PH., 2011, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiyono, H., 2005, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Shofie, Yusuf, 2011, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

- Sjawie, Hasbullah F., 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suprpto, 1963, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Widjaja, Jakarta.
- Syamsudin, M., 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Weisburd, David, Waring, Elin, dan Chayet, Ellen F., 2004, *White – Collar Crime and Criminal Careers*, Cambridge University Press, Cambridge.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972).
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351).
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-02/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492).

C. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Courtney, John C., "Recognition of Canadian Political Parties in Parliament and in Law", *Canadian Journal of Political Science*, Volume 11, Nomor 1, Maret, 1978.
- Feronica dan Lu Sudirman, "Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan dan Korupsi Korporasi di Indonesia dan Singapura", *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 2, Juni, 2011.
- Gunawan, Petra, "Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Subjek Hukum", *Dialogia Iuridica*, Volume 1, Nomor 11, Oktober, 2009.
- Ibrahim, Johnny, "Eksistensi Badan Hukum di Indonesia sebagai Wadah dalam Menunjang Kehidupan Manusia", *Law Review*, Volume 11, Nomor 1, Juli, 2011.
- Satria, Hariman, "Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Integritas*, Volume 4, Nomor 2, Desember, 2018.
- Wangga, Maria Silvy E., "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Integritas*, Volume 4, Nomor 2, Desember, 2018.
- Bawaeda, Adi Freddy, 2014, "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Tesis*, Magister Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kharisma Laras Sulu, 2016, "Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soleh, Mohammad Faisol, 2018, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Muladi, "Politik Kriminal Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan", *Makalah*, Seminar Tindak Pidana Di Bidang Perbankan di Universitas Diponegoro, Semarang, 11-12 Juni 1990.
- Sahetapy, J.E., "Kejahatan Korporasi Ditinjau dari Sudut Kriminologi", *Makalah*, Seminar Kejahatan Korporasi di Universitas Diponegoro, Semarang, 23-24 November 1989.

D. Internet

- Aliansi Nasional Reformasi KUHP, “R-KUHP”, http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2015/02/ICJR_UU-HP-per-17-Mei-2019.pdf, diakses pada 29 Juni 2019.
- Aji, M. Rosseno, “KPK Selidiki Lippo, Ini 4 Perusahaan yang jadi Tersangka Korupsi”, <https://nasional.tempo.co/read/1137549/kpk-selidiki-lippo-ini-4-perusahaan-yang-jadi-tersangka-korupsi>, diakses pada 23 April 2019.
- Banteka, Nadia, “The Rise Of The Extreme Right And The Crime Of Terrorism: Ideology, Mobilization, And The Case Of Golden Dawn”, <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1539&context=djil>, diakses pada 20 Juni 2019.
- Bernie, Mohammad, “KPK Buka Peluang Jadikan Golkar Tersangka Korupsi PLTU Riau-1”, <https://tirto.id/kpk-buka-peluang-jadikan-golkar-tersangka-korupsi-pltu-riau-1-cZVt>, diakses pada 7 Juni 2019.
- Faiz, Ahmad, “Survei: Partai Politik Makin Tidak Dipercayai Masyarakat”, <https://nasional.tempo.co/read/858765/survei-partai-politik-makin-tidak-dipercayai-masyarakat>, diakses pada 23 April 2019.
- Gabrillin, Abba, “Ada 8 Kepentingan PAN yang Diduga Dibiayai Zumi Zola dari Gratifikasi”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/24/06124261/ada-8-kepentingan-pan-yang-diduga-dibiayai-zumi-zola-dari-gratifikasi>, diakses pada 23 April 2019.
- Hukumonline, “Pukat: Seluruh Parpol Terlibat Kasus Korupsi”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi>, diakses pada 23 April 2019.
- Jurnaliston, Reza, “Bisakah Parpol Dijerat Tindak Pidana Korupsi Korporasi? Ini Kata KPK”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/22/19063541/bisakah-parpol-dijerat-tindak-pidana-korupsi-korporasi-ini-kata-kpk>, diakses pada 7 Juni 2019.
- Kusuma, Edward Febriyatri, “Perma Pidana Korporasi Bisa Jerat Partai Politik? Ini Penjelasan MA”, <https://news.detik.com/berita/d-3453108/perma-pidana-korporasi-bisa-jerat-partai-politik-ini-penjelasan-ma>, diakses pada 7 Juni 2019.
- Mashabi, Sania, “KPK sebut partai politik berbeda dengan organisasi korporasi”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-partai->

politik-berbeda-dengan-organisasi-koorporasi.html, diakses pada 7 Juni 2019.

Marsavelski, Aleksandar, “Responsibility of Political Parties for Criminal Offences: Preliminary Observations, Challenges and Controversies”, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2610306>, diakses pada 13 Juni 2019.

Movanita, Ambaranie Nadia Kemala, “Adriansyah Mengaku Minta Uang ke Bos MMS untuk Kongres PDI-P”, <https://internasional.kompas.com/read/2015/07/30/16474291/Adriansyah.Mengaku.Minta.Uang.ke.Bos.MMS.untuk.Kongres.PDI-P>, diakses pada 23 April 2019.

Prasetyo, Aji, “Dirut Duduk di Kursi Terdakwa, Pengadilan Tipikor Hukum Korporasi”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c32b9b65e3a3/dirut-duduk-di-kursi-terdakwa--pengadilan-tipikor-hukum-korporasi/>, diakses pada 9 Juni 2019.

Rachman, Dylan Aprialdo, “Perjalanan Kasus PT NKE, Korporasi Pertama yang Divonis Korupsi”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/04/06115311/perjalanan-kasus-pt-nke-korporasi-pertama-yang-divonis-korupsi>, diakses pada 23 April 2019.

Rastika, Icha, “Nazaruddin: Anas dan Andi Otak Korupsi Hambalang”, <https://regional.kompas.com/read/2012/10/16/14492611/nazaruddin.anas.dan.andi.otak.korupsi.hambalang>, diakses pada 23 April 2019.

Taher, Andrian Pratama, “KPK Telusuri Dana Suap Mengalir ke Munaslub Golkar 2017”, <https://tirto.id/kpk-telusuri-dana-suap-mengalir-ke-munaslub-golkar-2017-deuT>, diakses pada 23 April 2019.

Taher, Andrian Pratama, “Soal Indeks Persepsi Korupsi RI, KPK: 88% Koruptor Aktor Politik”, <https://tirto.id/soal-indeks-persepsi-korupsi-ri-kpk-88-koruptor-aktor-politik-dfnu>, diakses pada 23 April 2019.

Venice Commission, “Compilation of Venice Commission Opinions and Report Concerning Political Parties”, [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI\(2018\)006-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2018)006-e), diakses pada 20 Juni 2019.